

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Oleh

Andri Hanico¹,

Ermaya Suradinata², Kusworo³

¹⁾ Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
andrihanico21@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

*This study is entitled *The Performance of Regional General Elections Commissions in the Process of Regional Head Elections in Karimun Regency, Riau Islands Province*. This research is motivated by the authors' interest in examining the problems that arise regarding the Performance of Regional Election Commissions in the Process of Restoring the Regional Head General in Karimun Regency, Riau Islands Province. The author found that the problem of the Regional Election Commission in Karimun Regency is that it is still weak in managing organizational performance in the holding of regional elections in Karimun district in 2015, as seen from the low level of community participation.*

This study aims to describe the Performance of the Regional Election Commission of Karimun Regency in the Election Process of Regional Heads of Regents and Deputy Regents in Karimun Regency, the supporting and inhibiting factors that influence it and possible efforts to overcome obstacles in the process of regional elections Karimun Regency. The research method uses a descriptive qualitative approach. By using Dwiyanto's theory.

Based on the results of the study that the Performance of the Regional General Election Commission in the Process of Regional Head Elections in Karimun Regency was seen from the indicators of Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, and Accountability which were still not optimal. This can be seen from the lack of budget and the difficulty of facilities and infrastructure for sea crossing.

Suggestions to the Regional Election Commission in the Regional Head General Election Poses Regent and Deputy Regent in Karimun Regency include: need good budget management, increase socialization, conduct communication and cooperation with other related institutions.

Keywords: *performance, election commission, election of head regional*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Proses Pemulihan Umum Kepala

Daerah di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Penulis menemukan masalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun masih lemah memajemen kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah kabupaten karimun pada 2015 hal tersebut terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya serta upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karimun. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan teori Dwiyanto.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun dilihat dari indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran serta sulitnya sarana dan prasarana penyeberangan laut.

Saran kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun antara lain: perlu pengelolaan anggaran yang baik, meningkatkan sosialisasi, melakukan komunikasi dan kerja sama dengan instansi lain yang terkait.

Kata kunci: kinerja, komisi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar terselenggara Pemilu yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di sinilah dilihat betapa perlunya meningkatkan kesadaran politik bagi masyarakat ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, di mana kehidupan politik merupakan salah satu seginya. Tujuan yang demikian itu adalah juga merupakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal. Kesenjangan pendidikan semakin melebar tatkala,

orientasi pendidikan itu sendiri masih berfokus pada aspek kognitif, dan masyarakat lebih banyak diperlakukan sebagai objek pelengkap dalam proses pembelajaran. Apa yang individu pelajari di kelas terkadang tidak sesuai dengan kehidupan yang individu jalani sebagai anggota masyarakat, padahal individu adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan individu dalam pesta demokrasi (Pemilihan Umum). Semakin tinggi Partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya Partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Untuk mengetahui persentase jumlah pemilih yang masuk sebagai daftar pemilih tetap atau DPT di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah TPS dan DPT di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT (orang)		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Moro	58	6.963	6.337	13.219
2	Durai	18	2.416	2.263	4.679
3	Kundur	65	11.590	11.816	23.406
4	Kundur Utara	26	4.609	4.435	9.044
5	Kundur Barat	32	6.809	6.516	13.325
6	Karimun	77	18.618	17.837	36.162
7	Buru	24	3.865	3.663	7.528
8	Meral	52	15.962	15.115	31.077
9	Tebing	43	9.291	9.032	18.323
10	Meral Barat	23	4.566	4.277	8.793
11	Belat	20	2.609	2.457	5.066
12	Ungar	12	2.264	2.212	4.476
Jumlah		450	89.562	85.910	175.098

Sumber: KPUD Kabupaten Karimun 2016.

Untuk itu, pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Karimun periode 2016-2021 yang telah dilaksanakan pada 2015 lalu terlihat jelas tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Pemilihan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (orang)	Jumlah Pengguna Hak Pilih (orang)	Persentase (%)
1	Moro	13.219	7.344	56,23
2	Durai	4.679	3.005	64,22
3	Kundur	23.406	12.382	52,90
4	Kundur Utara	9.044	5.204	57,56
5	Kundur Barat	13.325	8.068	60,55
6	Karimun	36.162	16.509	45,65
7	Buru	7.528	4.398	58,42
8	Meral	31.077	15.126	48,67
9	Tebing	18.323	10.094	55,09
10	Meral Barat	8.793	5.617	63,88
11	Belat	5.066	3.122	61,63
12	Ungar	4.476	2.738	61,17
Jumlah		175.098	95.613	54.61

Sumber: KPU Kabupaten Karimun, 2016.

Hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun periode 2016-2021 di Kabupaten Karimun yang dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah pada 2015 lalu masih rendah yakni sebesar 54,61% dari total daftar pemilih tetap, padahal KPUD Karimun sebelumnya telah menetapkan target tingkat partisipasi masyarakat 70%.

Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah tidaklah ringan karena Komisi Pemilihan Umum daerah dengan kemandiriannya harus menyelenggarakan pemilihan umum dengan keterbatasan dan pengalaman ataupun keterbatasan lainnya. Kemudian jika dilihat di Kabupaten Karimun yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 249 pulau. Yang di mana KPUD bertanggung jawab untuk menyampaikan sosialisasi dan memenuhi kebutuhan logistik pemilihan di tiap-tiap kecamatan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil pengidentifikasian masalah penelitian sebagai berikut.

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun kepada masyarakat di Kabupaten Karimun sehingga partisipasi masyarakat masih rendah.
2. Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun sehingga KPUD sulit menyalurkan kebutuhan logistik pemilihan ke tiap-tiap Kecamatan.
3. Terbatasnya penyampaian informasi yang dilakukan KPUD dalam menyampaikan informasi mengenai data pemilih sementara dan data pemilih tetap, sehingga banyak pemilih tidak mengetahui namanya masuk sebagai daftar pemilih.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau pada 2015 .

KAJIAN PUSTAKA

Demokrasi

Hendri B. Mayo juga menyatakan demokrasi adalah sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mahfud, 2003: 19).

Jadi suatu sistem menganut paham Demokrasi apabila para pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat dewasa melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Yang mana dalam pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak memberikan suaranya dan dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan secara adil.

Kinerja Organisasi

Prawirosentono (1999: 2) mengungkapkan bahwa:

“Kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.”

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggung jawab namun tetap menaati segala peraturan, moral, maupun etika.

Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik menurut Dwiyanto (2008: 50-51) indikator-indikator atau kriteria-kriteria kinerja organisasi publik adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.

Model Pemilihan Umum Kepala Daerah

Prihatmoko (2005: 202) mengatakan sistem pilkada langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder atau sub-sub sistem. Bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*. Mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pilkada langsung merupakan dimensi electoral

regulation, yaitu segala ketentuan atau aturan mengenai pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon pemilih dan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur dan tata cara dalam sistem adalah terukur (*measurable*). Sistem pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih kepala daerah.

Pemilihan Langsung

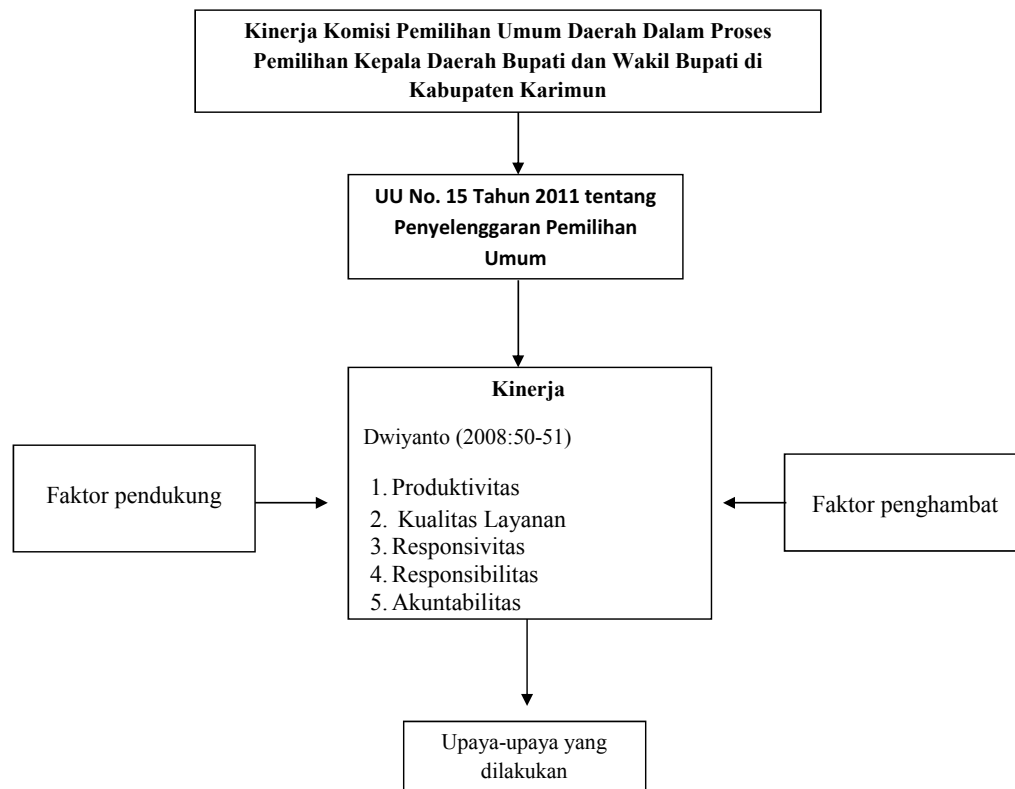
Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington, dan Bingham Powel (1978). Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokratis apabila: 1) Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur; 2) Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan; 3) Mekanisme Rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan 4) Akuntabilitas publik. Di bawah ini dijelaskan masing-masing parameter tersebut, secara lebih terperinci dan jelas pemilihan umum.

Rekrutmen jabatan politik atau publik dan adil harus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. Pemilu merupakan gerbang pertama yang harus dilewati karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat dibentuk. Kemudian setelah pemilihan biasanya orang akan melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam kehidupan politik, menurut Paige dalam Ramlan (2009: 144) dapat berbentuk “aktif, radikal, alienasi/apatis, serta partisipasi pasif”. Berdasarkan tinggi-rendahnya kedua faktor (kesadaran dan kepercayaan) tersebut.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1.

Kerangka Pikiran tentang Kinerja KPUK dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun 2015

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survei deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini. Survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan yang mewakili.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:4) bahwa: Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang dialami

(sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah instrument kunci. Menurut Sugiyama (2008: 31) mengemukakan bahwa: Metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur suatu penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara deskriptif.

Data yang Diperlukan

Dalam penelitian ini, dibutuhkan informasi yang dapat diperoleh melalui sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland (1984: 47) ialah "Kata-kata, dan tindakan-tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain".

Untuk mempermudah mengidenti-

fikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut sebagai berikut.

1. *Person* atau sumber data yang berupa orang, yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara baik wawancara terstruktur maupun wawancara semi terstruktur.
2. *Place* atau tempat di mana penulis memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data berupa *place* dalam penelitian ini yaitu Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun
3. *Paper* yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, gambar, angka dan simbol-simbol lain. Dalam penelitian ini paper merupakan segala sesuatu yang bersifat arsip, dokumen, berkas-berkas, peraturan-peraturan.

Informan dan Cara Menentukannya

Adapun penentuan informan yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan *key Person*. Sedangkan yang telah dijadikan narasumber oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Ketua KPUD Kabupaten Karimun
- Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun
- Camat Kecamatan Karimun
- Camat Kecamatan Moro
- Ketua PPK Kecamatan Karimun
- Ketua PPK kecamatan Moro
- Anggota PPS Kecamatan Karimun dan Moro
- Tokoh Masyarakat

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

▶ Interview (wawancara)

Dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode kualitatif, berkaitan dengan hal tersebut Creswell (2010: 267) menjelaskan bahwa:

“Dalam wawancara kualitatif, penulis dapat melakukan *face to face interview* (wawancara langsung) dengan responden maupun mewawancarai dengan telepon ataupun terlibat dengan *focus group interview* (interview dalam kelompok) yang terdiri enam sampai delapan partisipan dalam kelompok.”

Dalam penelitian ini, peneliti telah menggunakan wawancara semi struktur dengan menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara untuk menentukan arah proses wawancara..

▶ Dokumentasi

Dokumentasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013: 329) bahwa, “Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan (catatan harian, cerita, peraturan, biografi, kebijakan dan sebagainya) dan gambar (foto, gambar hidup, sketsa) serta karya-karya seseorang (karya seni)”.

▶ Triangulasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2013: 330) dalam bukunya menjelaskan bahwa:

“Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.”

Dalam triangulasi ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mendapatkan data wawancara dari informan yang dilakukan dengan wawancara semi struktur. Peneliti menggunakan observasi,

wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan.

HASIL PENELITIAN

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari:

- a. Produktivitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten karimun dapat dikatakan kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran dan pencapaian target yang belum sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga kendala lain seperti sulitnya infrastruktur penyeberangan laut di Kabupaten Karimun sehingga kurang maksimalnya produktivitas pada saat proses Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Karimun.
- b. Kualitas layanan komisi pemilihan umum daerah proses pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten karimun sudah cukup berkualitas. Hal ini dilihat dari pemberian informasi yang dilakukan komisi pemilihan umum kabupaten karimun di media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan lainnya.
- c. Responsivitas komisi pemilihan umum daerah kabupaten karimun dalam proses pemilihan umum bupati dan wakil bupati di kabupaten karimun sudah cukup maksimal. Hal ini dapat terlihat dari daya tangkap kinerja komisi pemilihan umum daerah kabupaten karimun yang langsung memproses jika ada pengaduan dari masyarakat jika ada namanya yang tidak masuk dalam DPT. Kemudian sesuai dengan keinginan masyarakat yang menginginkan pemilihan yang aman, lancar, bersih jujur dan adil.

- d. Responsibilitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun sudah cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab yang sudah terlaksana. Kemudian kerja sama Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan instansi-instansi lain yang berjalan dengan baik.
- e. Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun Dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun sudah cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat tingkat kesesuaian data pemilih yang tidak ada terjadi masalah. Kemudian juga tindakan cepat yang Komisi Pemilihan Umum Daerah lakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun provinsi Kepulauan Riau maka peneliti menyimpulkan bahwa Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau masih kurang maksimal.

Faktor penghambat dan pendukung Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

► Faktor penghambat

- 1) Ketersediaan anggaran yang minim
- 2) Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak suara untuk memilih kepala daerah masih rendah.

- 3) Sulitnya infrastruktur penyeberangan laut yang dihadapi komisi pemilihan daerah Kabupaten Karimun untuk untuk menyalurkan logistik pemilihan ke tiap-tiap kecamatan.

► Faktor Pendukung

- 1) Adanya peran dari instansi-instansi terkait yang ikut serta membantu komisi pemilihan umum daerah.
- 2) Adanya partisipasi dari tokoh masyarakat

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya memilih kepala daerah.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui seputar tentang pemilihan.
- c. Lebih banyak lagi melakukan komunikasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan di atas terkait Kinerja komisi pemilihan Umum Daerah dalam proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau penulis memberikan saran sebagai berikut.

► Saran Teoretis

1. Perlu dikaji secara mendalam mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah
2. Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan objek penelitian yang sama, diharapkan dapat menggunakan desain penelitian dan teknik analisis data

yang berbeda agar lebih memperbanyak sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait permasalahan yang diangkat.

► Saran Praktis

1. Hendaknya Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan lagi meliputi aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.
2. Adanya faktor penghambat Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau hendaknya diatasi kendala-kendala tersebut dengan memanfaatkan peluang yang ada, agar terciptanya keberhasilan yang maksimal pada pemilihan yang akan datang.
3. Upaya yang dilakukan terkait Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yaitu dengan:
 - a. Perlu ditingkatkan lagi Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya memilih kepala daerah.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun perlu lebih banyak lagi melakukan komunikasi dan kerja sama dengan instansi lainnya sebagai referensi komisi pemilihan umum daerah dalam menerima masukan-masukan dan melaksanakan tanggung jawab.
 - c. Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karimun perlu

menyediakan sarana dan prasarana seperti melakukan kegiatan simulasi pemilihan untuk masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui seputar tentang pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan Bisri A. Zaini., 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi., 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 1994. *Partisipasi dan Partai Politik (sebuah bunga rampai)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bawaslu. 2009. *Pedoman Pengawasan Pemilu 2009*. Jakarta: Election-MDP.
- Dwiyanto, Agus, 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Creswell, John, W., 2016, *Research Design*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fahmi, Irham, 2015, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung
- KPU. 2010. "Modul: Pemilihan Umum". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Mahfud, Moh. MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF
- Mas'oed, Mohtar dan MacAndrews. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani, 2013, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Pahmi Sy. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Pradhanawati, Ari., 2005. *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta: KOMPIP.
- Purwanto. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Said, Gatara, A.A dan Dzulkiah, Said, Moh., 2007. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Simangunsong, Fernandes, 2016, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan, 2009. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka
- Syafhendry. 2016. *Perilaku Pemilih "Teori dan Praktik"*. Pekanbaru: Alaf Riau..
- Thoah, Miftah. 1995. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosis dan Intervensi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, Sadu dan Simangunsong, Fernandes, 2015 *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi yang Diperluas)*, IPDN Press, Jatinangor

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.